RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA

AKD: RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA

Bulan: September 2025

Oleh: RUU PENGELOLAAN RUANG UDARA

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

1. Latar Belakang

- Hingga saat ini belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur pengelolaan ruang udara.
- Kekosongan hukum meliputi:
  - Penggunaan wahana udara nirawak (balon udara, drone).
  - Pelanggaran ruang udara oleh pesawat atau wahana asing.
  - Ketentuan sanksi dan pidana, selama ini hanya sanksi administratif.
- Presiden sejak 2024 telah menyampaikan Surat Presiden (Surpres) kepada Ketua DPR, menugaskan Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum membahas RUU bersama DPR.

---

2. Proses Legislasi

- 25 September 2024: Pansus DPR menetapkan RUU sebagai carry over.
- 18 September 2025: Pansus DPR menyetujui pembahasan lanjutan RUU dalam rapat kerja bersama pemerintah.
- Panitia Kerja (Panja) dipimpin oleh Junico BP Siahaan (PDIP).
- Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) disetujui, termasuk perubahan redaksi pasal:
  - Pasal 1 angka 15: frasa “setiap orang” ? “setiap orang adalah perseorangan, termasuk korporasi”.

---

3. Substansi Penting RUU

1. Menutup kekosongan hukum terkait pengelolaan ruang udara.
2. Menindak pelanggaran ruang udara, khususnya oleh pesawat/wahana asing.
3. Mengatur sanksi pelanggaran ruang udara yang selama ini belum ada.
4. Memuat ketentuan pidana, bukan hanya sanksi administratif.
5. Mengatur penggunaan wahana udara nirawak (balon udara, drone).

---

4. Ketentuan Penting dalam Pasal RUU

- Pasal 46 ayat (1) huruf a–c: Penyidik tindak pidana ruang udara adalah Polri, PPNS, dan TNI AU.
- Pasal 49 ayat (2–5): Aturan penyampaian hasil penyidikan dan pengangkatan penyidik TNI AU.
- Pasal 55: Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

---

5. Pandangan Fraksi PDIP

- Mendukung percepatan pengesahan RUU, dengan catatan:
  - RUU perlu menunggu pengesahan RUU KUHAP agar ketentuan pidana selaras dengan KUHAP sebagai lex generalis.
- Tiga pokok pandangan:
  1. Partisipasi masyarakat ? mekanisme aspirasi & sinkronisasi dengan pemerintah daerah perlu diatur agar adil dan harmonis.
  2. Kepentingan nasional ? pengaturan kawasan udara nasional & internasional, serta kerja sama yang mengutamakan kepentingan nasional.
  3. Riset ruang udara ? diatur ketat untuk mencegah spionase dan ancaman asing, sesuai Konvensi Chicago 1944. Penelitian oleh lembaga asing harus melalui izin khusus (selaras dengan UU No.16/2023 tentang Landas Kontinen).

---

6. Penegakan Hukum

- Ditekankan perlunya kerja sama sipil dan militer yang harmonis, seimbang, dan selaras.
- Kewenangan penyidikan oleh Polri, PPNS, dan Perwira TNI AU diapresiasi karena memperjelas batas sipil-militer.

---

7. Regulasi Terkait

- Regulasi utama:
  - UU No. 3/2025 (Perubahan UU TNI).
  - UU No. 71/2024 (Kerja sama pertahanan dengan Prancis).
  - UU No. 67/2024 (Kerja sama pertahanan dengan India).
  - UU No. 70/2024 (Kerja sama pertahanan dengan Kamboja).
  - UU No. 69/2024 (Kerja sama pertahanan dengan UEA).
  - UU No. 68/2024 (Kerja sama pertahanan dengan Brasil).
  - UU No. 3/2023 (Kerja sama pertahanan dengan Singapura).
  - UU No. 2/2023 (Kerja sama pertahanan dengan Fiji).
  - UU No. 22/2023 (Traktat Pelarangan Senjata Nuklir).
- Regulasi pendukung:
  - Keppres No. 8/2025 (peningkatan status pangkalan TNI AU).
  - Permenhan No. 7/2024 (sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara).

---

8. Kesimpulan

- RUU Pengelolaan Ruang Udara sangat mendesak karena selama ini ruang udara Indonesia belum memiliki payung hukum khusus.
- RUU mengatur aspek hukum, pidana, pertahanan, penggunaan wahana udara nirawak, serta partisipasi masyarakat.
- Pembahasan RUU di DPR menunjukkan arah positif, dengan dukungan mayoritas fraksi, khususnya PDIP, meskipun masih ada sinkronisasi yang harus dilakukan dengan KUHAP.
- Regulasi terkait pertahanan menjadi fondasi penting dalam menguatkan pengaturan ruang udara sebagai bagian dari kedaulatan negara.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Ini 5 Substansi RUU Pengelolaan Ruang Udara	https://www.hukumonline.com/be \nrita/a/ini-5-substansi-ruu-pen \ngelolaan-ruang-udara-lt68cb754 \ne0d17a
Berita	Moreno Soeprapto: Ruang Udara Jadi Pilar Kedaulatan dan Pertumbuhan Ekonomi	https://jdih.dpr.go.id/berita/ \ndetail/id/59411/t/Moreno+Soepr \napto%3A+Ruang+Udara+Jadi+Pilar \n+Kedaulatan+dan+Pertumbuhan+Ek \nonomi
Berita	Perkuat Koordinasi Pengelolaan Ruang Udara, Amelia Dukung Pembentukan Badan Permanen	https://jdih.dpr.go.id/berita/ \ndetail/id/59467/t/Perkuat+Koor \ndinasi+Pengelolaan+Ruang+Udara \n%2C+Amelia+Dukung+Pembentukan+ \nBadan+Permanen
Berita	RUU Pengelolaan Ruang Udara Jadi UU, Atur Drone hingga Penegakan Hukum	https://www.hukumonline.com/be \nrita/a/ruu-pengelolaan-ruang-u \ndara-jadi-uu--atur-drone-hingg \na-penegakan-hukum-lt69253d9668 \n6ae/
Berita	RUU Pengelolaan Ruang Udara Resmi Disahkan DPR RI Dalam Rapat Paripurna	https://www.kemhan.go.id/2025/ \n11/25/ruu-pengelolaan-ruang-ud \nara-resmi-disahkan-dpr-ri-dala \nm-rapat-paripurna.html
Berita	RUU Pengelolaan Ruang Udara Siap Diparipurnakan	https://www.hukumonline.com/be \nrita/a/ruu-pengelolaan-ruang-u \ndara-siap-diparipurnakan-lt68c \nadb147696b/
Berita	RUU Pengelolaan Ruang Udara Tegaskan Kedaulatan dan Pemanfaatan Teknologi Dirgantara	https://emedia.dpr.go.id/news/ \n2025/11/27/ruu-pengelolaan-rua \nng-udara-tegaskan-kedaulatan-d \nan-pemanfaatan-teknologi-dirga \nntara
Berita	Sekjen Kemhan Hadiri Pembahasan Lanjutan RUU Pengelolaan Ruang Udara di DPR RI	https://www.kemhan.go.id/2025/ \n09/05/sekjen-kemhan-hadiri-pem \nbahasan-lanjutan-ruu-pengelola \nan-ruang-udara-di-dpr-ri.html
Berita	TNI AU: FGD Revisi Doktrin Swa Bhuwana Paksa	https://rri.co.id/nasional/185 \n4970/tni-au-fgd-revisi-doktrin \n-swa-bhuwana-paksa
Buku	Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa	https://opac.dpr.go.id/index.p \nhp?p=show_detail&id=21821&keyw \nords=wilayah+udara
Buku	Hukum Transportasi Udara: Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999	https://opac.dpr.go.id/index.p \nhp?p=show_detail&id=19793&keyw \nords=wilayah+udara
Buku	Hukum Udara Indonesia Dan International	https://opac.dpr.go.id/index.p \nhp?p=show_detail&id=20234&keyw \nords=wilayah+udara
Buku	Hukum udara nasional dan internasional publik = public international and national air law	https://opac.dpr.go.id/index.p \nhp?p=show_detail&id=27863&keyw \nords=wilayah+udara
Buku	Kedaulatan Negara di Ruang Udara	https://opac.dpr.go.id/index.p \nhp?p=show_detail&id=13825&keyw \nords=wilayah+udara
Buku	Kepentingan Nasional Dalam Pemanfaatan Ruang Udara Internasional	https://opac.dpr.go.id/index.p \nhp?p=show_detail&id=40076&keyw \nords=
Buku	Penegakan kedaulatan negara di udara: airways di atas alur laut kepulauan Indonesia	https://opac.dpr.go.id/index.p \nhp?p=show_detail&id=37307&keyw \nords=wilayah+udara
Buku	Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967	https://opac.dpr.go.id/index.p \nhp?p=show_detail&id=17637&keyw \nords=ruang+udara
Buku	Tol Udara Nusantara	https://opac.dpr.go.id/index.p \nhp?p=show_detail&id=37906&keyw \nords=ruang+udara

Buku	Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara	https://opac.dpr.go.id/index.p \nhp?p=show_detail&id=21829&keyw \nords=wilayah+udara
Undang-undang & Peraturan	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	https://www.hukumonline.com/pu \nsatdata/detail/lt682450dfd7ec9 \n/undang-undang-nomor-3-tahun-2 \n025/